

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN
USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAGI
MASYARAKAT NELAYAN DI DINAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

TRI RIZKI RAHMAYANI
NPM 1303100047

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAGI MASYARAKAT NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan kemiskinan. Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi sehingga untuk menyelesaikannya di perlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial, kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang di gunakan nelayan berpengaruh pada cara menangkap ikan, keterbatasan pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan, salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan melaksanakan program PUMP. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas program pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriftif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara terbuka. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kasi Perikanan Tangkap, Pendamping PUMP-PT, dan Masyarakat Nelayan. Kemiskinan nelayan masih dibawah garis kemiskinan karena masyarakat nelayan tidak mampu mengelola dana BLM PUMP dengan baik. Strategi pelaksanaan program PUMP di Kota Medan diawali dengan sosialisasi yang mana tim penyuluh memberikan arahan tentang bagaimana cara mengelola dana PUMP. Pencapaian tujuan program PUMP di Kota Medan penyaluran dana BLM hanya mampu meningkatkan pendapatan dalam waktu jangka pendek dan tidak mampu menumbuhkan kembangkan kewirausahaan nelayan. Mengevaluasi hasil program PUMP dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat nelayan semenjak tahun 2014 program PUMP telah dihentikan dikarenakan ketidakmampuan KUB bertahan dalam usaha perikanan dan dalam mengelola dana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan kurang efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Konsep Efektivitas	8
1. Pengertian Efektivitas	8
2. Kriteria Efektivitas	10
3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	14
4. Pengertian Efektivitas Kerja.....	17
B. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap.....	18

C. Penanggulangan Kemiskinan	22
1. Kemiskinan	24
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan	25
D. Masyarakat Nelayan.....	28
1. Pengertian Masyarakat.....	28
2. Pengertian Nelayan.....	29
3. Penggolongan Nelayan	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Teknik Pengumpulan Data	33
C. Kategorisasi	34
D. Definisi Konsep	35
E. Kerangka Konsep.....	37
F. Teknik Penentuan Narasumber.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	42
2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	46
3. Tugas Pokok dan Fungsi	50
4. Sarana dan Prasarana	59
5. Kebijakan	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	63
1. Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kota Medan	63
2. Potensi Sumber Daya Perikanan di Kota Medan	65
3. Kehidupan Nelayan di Kota Medan	66
B. Analisis Berdasarkan Hasil Wawancara	67
1. Kemiskinan Nelayan.....	67
2. Strategi Pelaksanaan Program.....	71
3. Pencapaian Tujuan.....	76
4. Mengevaluasi Hasil	81
C. Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Bagi Masyarakat Nelayan.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Indikator Kinerja Sasaran yang Akan Dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	45
Tabel 3.2 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan	46
Tabel 3.3 : Susunan Kepegawaian Bidang Organisasi	47
Tabel 3.4 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
Tabel 3.5 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Fungsi Jabatan.....	49
Tabel 3.6 : Sarana dan Prasarana Sektor Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2016	59
Tabel 3.7 : Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional Pertanian dan Perikanan Kota Medan	60
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Miskin di Kota Medan Tahun 2012 – 2014 ...	63
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kota Medan	64
Tabel 4.3 : Data Pemanfaatan BLM PUMP Perikanan Tangkap Tahun 2011–2014	88
Tabel 4.4 : Data Penerima BLM PUMP Perikanan Tangkap di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, jumlah penduduk miskin Kota Medan mencapai 200,32 juta orang, dimana 25,14 persen diperkirakan tinggal di wilayah pesisir. Kemiskinan masih selalu saja masalah yang sangat sering dialami oleh setiap daerah khususnya daerah pesisir yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah nelayan. Dengan demikian masalah kemiskinan adalah masalah yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah pesisir khususnya pembangunan kelautan dan perikanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2014 menjelaskan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat kelautan dan perikanan adalah kurangnya akses terhadap permodalan, pasar teknologi, perlindungan sosial budaya, tidak memiliki asset sebagai modal aktif, menurunnya kualitas lingkungan, serta lemahnya kelembagaan masyarakat.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional,

khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja. Pada saat krisis ekonomi, peranan sektor perikanan sangat signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa. Akan tetapi ironisnya, sektor perikanan selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintahan dan kalangan pengusaha, padahal bila sektor perikanan dikelola secara serius akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional dan dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia terutama masyarakat nelayan dan petani ikan.

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi sehingga untuk menyelesaikannya di perlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat menjadi objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang di gunakan nelayan berpengaruh pada cara menangkap ikan, keterbatasan pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Berbagai kegagalan yang di alami oleh kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan yang di ambil oleh pemerintahan menunjukkan bahwa, masalah kemiskinan bukan lah hal yang sederhana, tetapi suatu fenomena yang memiliki variabilitas dimensi yang sangat kompleks. Asumsi dari pemerintahan yang memandang masalah kemiskinan di Indonesia secara umum dan parsial dengan formula kebijakan berupa penyeragaman berbagai bentuk program dengan pendekatan yang monolitik sentralistik telah mengakibatkan terjadinya *policy bias*. Dari asumsi yang salah karena ketidakmampuan memahami persoalan kemiskinan sebagai suatu gejala yang spesifik dan berbeda di setiap daerah telah menciptakan jurang pemisah yang cukup besar antara kota dan desa serta antara golongan masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Kondisi ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat yang yang terus bergulir.

Salah satunya Wilayah Pesisir yang ada di Kota Medan yang termasuk kategori miskin dimana masyarakatnya mayoritas adalah nelayan, yaitu Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan merupakan Kelurahan yang dengan penduduk berjumlah 17.384 jiwa atau 30,23 persen dari total jumlah penduduk di Kecamatan Medan Marelan. Dari program – program yang disalurkan oleh Pemerintah, melalui penyaluran bantuan – bantuan yang di regulasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, mengalami beberapa kendala, salah satunya sikap hidup masyarakatnya cenderung menyalagunakan uang hasil melaut.

Berdasarkan problematika yang dihadapi oleh Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, maka negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, menyusun misi “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”, yang merupakan salah satu strategi untuk Pengentasan kemiskinan melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Kegiatan ini dilaksanakan karena dilatar belakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang pada umumnya bermata pencaharian nelayan tradisional atau dapat digolongkan kepada masyarakat miskin.

Oleh sebab itu, ditinjau dari pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) terkhususnya pelaksanaan pada Bidang Perikanan Tangkap atau disebut dengan PUMP-PT, masih banyak terdapat masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Wilayah Pesisir Kota Medan. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian pada Bidang Perikanan Tangkap dengan judul **“Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Bagi Masyarakat Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan”**.

B. Perumusan Masalah

Pada dasarnya masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan perkembangan. Dengan demikian masalah adalah tantangan dan kesulitan yang timbul dan harus diatasi dengan beberapa solusi dan alternatif

pemecahan masalah, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Guba Lincoln dalam Moleong, (2004: 66) mengatakan bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah :

“Bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan bagi Masyarakat Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan bagi Masyarakat Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.”

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi pelayanan pemberdayaan masyarakat miskin.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tolak ukur dalam meningkatkan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan di Desa/Kelurahan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang konsep efektivitas, program pengembangan usaha mina pedesaan bidang perikanan tangkap, penanggulangan kemiskinan, masyarakat nelayan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, teknik penentuan

narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban responden.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran - saran yang di teliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, (2003: 284) efektivitas adalah suatu kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “efektive” yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik, jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja secara efektif. Dalam pelaksanaan kerja selalu memakai lima macam sumber usaha. Yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang dan benda. Walaupun dalam gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis pekerjaan, namun pada umumnya setiap orang dalam melakukan kegiatan tertentu menginginkan suatu hal yang maksimal. Tetapi permasalahan efektivitas bukanlah sesederhana pengertian di atas, karena efektivitas itu menyangkut banyak hal, oleh karena itu ahli memberikan definisi yang beragam untuk menjelaskan apa arti batasan dari pengertian efektivitas itu.

Kegiatan yang dilaksanakan sesuai proses dan waktu yang ditentukan maka dapat menghasilkan kebijakan yang baik dan inilah yang disebut dengan efektivitas. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siagian, (2001: 24) bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang di jalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tepat sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sedangkan menurut Gie, (2007: 2) mengatakan bahwa efektivitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang di kehendaki. Jadi, perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana di kehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif karena dilihat dari segi usaha hasil yang di kehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur yang minimal.

Menurut Suamaryadi, (2005: 105) mengatakan bahwa efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Begitu juga yang dikemukakan oleh Gie, (2000: 260) bahwa efektivitas bermanfaat dalam memberikan pelayanan pada orang lain atau kepada organisasi yang menggunakan produknya seperti halnya dengan organisasi yang bersangkutan. Efektivitas memiliki sifat utama bagi organisasi antara lain :

1. Berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu.
2. Menjamin terhadap perkembangan industry dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan.

3. Menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dan menjalankan program.
4. Mengikutsertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan.

Sedangkan Kurniawan, (2005: 105) mengemukakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.

Dari pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu taraf sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang dilakukan dengan benar dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kriteria Efektivitas

Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria efektivitas yang menyangkut faktor internal dan eksternal organisasi, antara lain :

- 1) Produktivitas organisasi atau output
- 2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan- perubahan di dalam dan di luar organisasi
- 3) Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan- hambatan konflik diantara bagian- bagian organisasi

Selanjutnya Streers, (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlabar
- 5) Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Streers, (2005:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran Efektivitas, sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, baik dalam arti perodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

4. Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai proses pengukuran akan efektivitas, guna melihat sejauh mana tujuan dalam suatu program.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian, (2007:2004), yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu mengolah tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi- fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat- alat dan sumber daya yang ada.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Gibson, (1992:28) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah :

a) Kemampuan

Kemampuan adalah kemampuan seseorang dalam dirinya, baik kemampuan teknik maupun kemampuan umum.

Kemampuan ini diperlukan terutama kemampuan atasan dalam mengarahkan anggotanya untuk mencapai hal-hal yang diinginkan.

b) Keahlian

Keahlian adalah kemampuan spesifik untuk mengenai masalah teknis tertentu dalam pekerjaan.

c) Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan suatu kemampuan yang diperoleh dan pengembangan diri melalui penelusuran keilmuan.

d) Sikap

Sikap adalah kepribadian yang tercermin dari wujud perilaku seseorang dengan sikap yang baik maka efektivitas dapat dijalankan dengan baik.

e) Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.

f) Stress

Stress adalah tekanan yang timbul akibat tekanan lingkungan diluar diri manusia seperti yang dilakukan.

Sedangkan Steers (2005:20) mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu :

1) Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi dan teknologi dalam organisasi

2) Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan adalah karakteristik organisasi berpengaruh terhadap efektivitas disamping lingkungan luar dan dalam telah dinyatakan berpengaruh terhadap efektivitas. Lingkungan luar yang dimaksud misalnya hubungan dengan masyarakat sekitar, sedangkan lingkungan dalam misalnya karyawan atau pegawai di perusahaan

3) Karakteristik Pekerja

Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi

4) Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kebijakan dan Praktek Manajemen dapat mempengaruhi atau merintangai pencapaian tujuan, ini tergantung bagaimana kebijakan dan praktek manajemen dalam tanggung jawab terhadap para karyawan atau organisasi

Gie (2001:29) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain :

1) Waktu

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama, semakin lama tugas dibebankan itu dikerjakan, maka

semakin banyak tugas lain menyusul dalam hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit

2) Tugas

Bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka

3) Produktivitas

Seorang pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik, demikian pula sebaliknya

4) Evaluasi Kerja

Pimpinan memberikan dorongan, bantuan dalam informasi kepada bawahannya, harus melaksanakan dengan baik atau tidak

5) Pengawasan

Dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terpantau, hal ini dapat memperkecil resiko dalam pelaksanaan tugas

6) Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan tempat kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seorang pegawai dalam bekerja

7) Perlengkapan dan Fasilitas

Suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya proses efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga dapat berjalan relatif singkat. Suatu pelaksanaan kerja tersebut di proses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang dimaksudkan dalam definisi efektivitas itu sendiri.

4. Pengertian Efektivitas Kerja

Menurut Gie, (2000:23), efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau kehendak kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu, sebagaimana yang di kehendaknya.

Menurut Siagian, (2007 : 151), efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan, artinya pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai baik atau tidak tergantung kepada penyelesaian kerja tersebut, bagaimana menyelesaikan dan beberapa biaya yang dikeluarkan.

Komaruddin (2000:126) mengatakan efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan menejer, artinya manajemen yang efektif tidak selalu harus disertai efisiensi yang maksimum.

Sedangkan Siagian (2001: 171) juga mengatakan efektivitas kerja adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah di alokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan.

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas kerja adalah suatu kegiatan-kegiatan dalam organisasi baik itu organisasi pemerintah atau swasta, orientasi pemikirannya dan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas, artinya bagaimana agar kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dengan baik tanpa terjadinya pemborosan. Begitu pula halnya dalam penyusunan sistem, prosedur kerja beserta teknis pelaksanaannya hendaknya berlandaskan pada efisiensi dan efektivitas.

B. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan presiden telah mengeluarkan perpres No.15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 sampai 10 persen pada akhir 2014. Pada program penanggulangan kemiskinan bersasaran klaster II kelompok kedua adalah program-program kemiskinan yang sarasanya adalah komunitas. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran komunitas dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat. Contoh program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegritas, efisien, berkualitas dan percepatan.

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan ini juga dicirikan dengan kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembangnya karena berjalannya sistem dan usaha mina bisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan perikanan (*minabisnis*).

Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10 tahun 2014, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan yang selanjutnya di sebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM KP melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan sesuai potensi desa.

PNPM Mandiri KP adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan, penumbuh kembangan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan, program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri KP dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Sesuai visi Kementrian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, yaitu “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk mewujudkan misi tersebut maka misi yang dikeluarkan adalah :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- c. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan.

Salah satu strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut dilaksanakan melalui pemberdayaan dan kewirausahaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada lingkup kementerian kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT), Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional undang-undang dasar 1945 beserta amandemennnya, landasan idil pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PUMP Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Dasar peraturan perundangan sistem yang digunakan adalah :
 - a. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- b. PP No.54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
2. Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan pembangunan yang terkait adalah:
 - a. Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
 - b. Undang-undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
 - c. Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.

Pelaksanaan PUMP diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan nelayan dikoordinasikan oleh Direktorat Jendral Perikanan Tangkap sebagai lanjutan pembinaan nelayan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada kegiatan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2009-2010 yang dalam hal ini dilaksanakan Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan. Sasaran utama program PUMP-PT ini adalah dengan terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB).

KUB adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi keinginan bersama untuk berusaha bersama dan di pertanggung jawabkan

secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Pembentukan KUB sebaiknya dikerangkai oleh pranata-pranata dan jaringan sosial yang dimiliki masyarakat nelayan. Eksistensi dan jaringan sosial sangat berarti dan strategis bagi rumah tangga nelayan (Kusnadi, 2007).

Kelompok ini nantinya akan menjadi wadah atau tempat untuk mengembangkan tujuan dari program ini. Kelompok seperti ini pun sudah ada sejak adanya bantuan dari PNPM Kelautan dan Perikanan, sehingga KUB ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari kelompok sebelumnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program pengembangan usaha mina pedesaan adalah pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan, menumbuh kembangkan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan.

C. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Terdapat 4 strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu :

- a. Memperbaiki program perlindungan sosial.
- b. Meningkatkan akses pelayanan dasar.
- c. Memberdayakan kelompok masyarakat.
- d. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*Inclusive Growth*).

Menurut Suyanto (2001:214) Penanggulangan kemiskinan adalah kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat yang memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi maraknya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat untuk keluar dari masalah kemiskinan.

Menurut Suyanto (2003:215) ada 2 (dua) pokok utama dalam penanggulangan masalah kemiskinan secara efektif yaitu :

- 1) Pendekatan Partisipasi

Adalah pentingnya pemilikan kemauan aktif untuk dapat terlibat langsung tidak hanya diawal pendefinisian masalah, tetapi juga ketiga proses berlangsung, dalam hal ini kelompok masyarakat miskin hendaknya menjadi objek/sasaran dari program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan

- 2) Membuka Koperasi

Koperasi merupakan model pembangunan alternatif yang menjanjikan dapat terwujudnya pembangunan berdasarkan swadaya masyarakat bawah yang *grass-root* yakni, sebagai gerakan kemandirian yang sekaligus meningkatkan harga diri dan percaya diri, sebagai kekuatan utama untuk mencapai ketahanan nasional

suatu bangsa. Dalam koperasi, manusia sendiri dibangun dan sekaligus yang membangun.

Dari beberapa pendapat para ahli yang diatas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan produktifitas masyarakat miskin sebagai dampak langsung dari suatu pembangunan, sementara dilain pihak pemilikan aset ekonomi sebagai pokok-pokok penghidupan masyarakat untuk mampu hidup mandiri perlu didorong, dan termasuk aset ekonomi dalam dimensi sumber daya manusia (SDM).

1. Kemiskinan

Menurut Friedmann, (2010:101) kemiskinan didefenisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat di gunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna.

Sedangkan Hall dan Midgley, (2004: 14) menyatakan kemiskinan dapat di artikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif di bandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

Menurut Syaifuddin, (2007: 32) membagi cara berfikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolute dan sebagai gejala relative. Cara berfikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistic ini terdiri atas dua cara pandang (model) kebudayaan, cara pandang (model) struktural.

Secara umum defenisi-defenisi tentang kemiskinan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau keterbatasan fisik dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Menurut Mankiw (2000: 158) dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Sedangkan Sukirno (1999: 25) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar di setiap

golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*Growth with equity*).

Menurut Sarasutha dan Noor dalam Supadi dan Achmad Rozany, (2008: 3-4) kemiskinan secara konseptual dapat di bedakan atas empat pengertian , yaitu kemiskinan subyektif, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural.

a. Kemiskinan subyektif

Setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut atau relatif sebenarnya orang itu tidak tergolong miskin. Kemiskinan subyektif terjadi karena individu menyamaratakan keinginan (*want*) dengan kebutuhan (*needs*).

b. Kemiskinan relatif

Kondisi dimana seseorang atau keluarga memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan minumannya sehari-hari secara efisien. Pengertian kemiskinan relatif berkaitan dengan konsep *relatif deprivation* dimana kemampuan pemenuhan kebutuhan seseorang atau keluarga berada dalam posisi relatif terhadap anggota masyarakat lain yang tinggal dalam suatu wilayah. Konsep ini terkait erat dengan ketimpangan pendapatan.

c. Kemiskinan absolut

kemiskinan absolut lebih banyak di gunakan oleh pemerintahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada berbagai sektor pelayanan publik, misalnya di bidang pangan, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Penggunaan defenisi kemiskinan absolut dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan yang di tetapkan oleh pemerintahan adalah karena defenisi dan pendekatan yang tersebut dapat digunakan untuk menilai dari efek kebijakan anti kemiskinan antar waktu atau perkiraan dampak suatu proyek terhadap kemiskinan. Pengertian kemiskinan relatif menurut BPS (2008) adalah suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

d. Kemiskinan kultural

Kondisi dimana penyebabnya sikap hidup yang berasal dari gaya hidup seseorang atau keluarga yang selalu merasa kekurangan sehingga menyebabkan masuk kedalam kemiskinan. Seseorang atau keluarga yang mampu tetapi ia juga membuat dirinya menjadi miskin.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah dimana pendapatan tahunan individu suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar

pengeluaran yang dibutuhkan, seseorang yang hidup dibawah standar pengeluaran disebut golongan miskin, ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan terdapat lebih banyak pendapatan untuk diperbelanjakan yang jika terdistribusi dengan baik akan mengurangi kemiskinan dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan.

D. Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan merupakan paduan dari dua kata masyarakat dan nelayan, berikut pengertian dari masing-masing kata tersebut :

1. Pengertian Masyarakat

Pengertian masyarakat yang dalam istilah bahasa Inggris disebut Society (berasal dari kata Latin, socius yang berarti “kawan”). Masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang artinya ikut serta atau berperan serta. Jadi masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain.

Menurut Hasan Sadly, (1997: 31) dalam bukunya yang berjudul “sosiologi untuk masyarakat Indonesia” masyarakat adalah suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Djodjodigoea dalam Mansyur, (1984: 21) masyarakat mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit masyarakat adalah terdiri dari satu golongan saja, sedang arti luas masyarakat adalah kebulatan dari

semua perhubungan yang mungkin dalam masyarakat dan meliputi semua golongan.

Menurut Horton & Hunt, (2007:21) bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Koentjaraningrat dalam “ ilmu sosial dasar” masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas proyeksi individu sebagai (*input*) bagi keluarga, keluarga sebagai tempat prosesnya, dan masyarakat adalah tempat kita melihat hasil (*output*) dari proyeksi tersebut

Dari beberapa pendapat para ahli yang di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas, masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.

2. Pengertian Nelayan

Nelayan di dalam Ensiklopedia Indonesia di golongkan sebagai pekerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.

Dalam kamus besar Indonesia pengertian nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usaha menangkap ikan di laut.

Sedangkan dalam buku yang berjudul “Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa” menurut Mansyur, (1984: 148) mengatakan bahwa masyarakat nelayan dalam hal ini bukan berarti mereka yang mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya akan tetapi orang-orang yang integral dalam lingkungan itu.

Nelayan menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dilaut.

Dari beberapa defenisi nelayan yang telah di sebutkan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian nelayan adalah bagian bagian dari masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan memiliki ke khasan tersendiri yang berbeda dengan kondisi masyarakat diluar komunitas.

3. Penggolongan Nelayan

Menurut Townsley dalam Widodo (2006 :57) mengemukakan bahwa beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan, dalam suatu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat.

Menurut Widodo (2006:12) penggolongan nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi

pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Nelayan Buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- b. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.
- c. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Sedangkan Kusnadi (2009) mengatakan bahwa penggolongan nelayan adalah suatu kelompok yang memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar dan memberi peluang mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan, masyarakat atau kelompok sosial nelayan merupakan pilar sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penggolongan nelayan adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan di laut dan hidup di daerah pantai, bukan mereka yang bertempat tinggal di pedalaman, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka juga mencari ikan di laut karena mereka bukan termasuk komunitas yang memiliki ikatan budaya masyarakat pantai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Moleong, (2007: 5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku individu dan sekelompok orang. Penelitian kualitatif yang dapat disimpulkan menurut defenisi para ahli adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-lain. Dengan cara deskriptif analisis kualitatif suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara terbuka.

Sedangkan Creswell, (2010: 52) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian

kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk pengadaaan dan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Ali, (1997: 198) bahwa teknik pengumpulan data yang tepat untuk mendapatkan data kualitatif pada umumnya agak berbeda dengan pengumpulan data melalui data kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik :

1. Data Primer

Adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian, melalui cara wawancara.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih, khususnya tentang Program Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Bagi Masyarakat Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian di analisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

C. Kategorisasi

Kategorisasi adalah suatu penyusunan atau pengelompokan unsur untuk menunjukkan bagaimana cara mengukur atau menggambarkan suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui jelas apa yang telah menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel – variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dari Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan bagi Masyarakat Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, adalah :

1. Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan bukan solusi secara parsial.

2. Strategi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

Konsepsi pembangunan ekonomi kelautan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegritas, efisien, berkualitas dan

percepatan yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program.

3. Pencapaian tujuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta perluasan dan peningkatan kesempatan kerja sehingga pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan.
4. Mengevaluasi hasil Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dalam mencapai target yang di sesuaikan dengan sasaran dan ketentuan yang berlaku.

D. Definisi Konsep

Menurut Nawawi, (1992: 12) mengemukakan konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Untuk memperjelas dan meyelerhanakan beberapa konsep uraian teoritis dalam penelitian maka peneliti menyederhanakan beberapa konsep tersebut sebagai berikut :

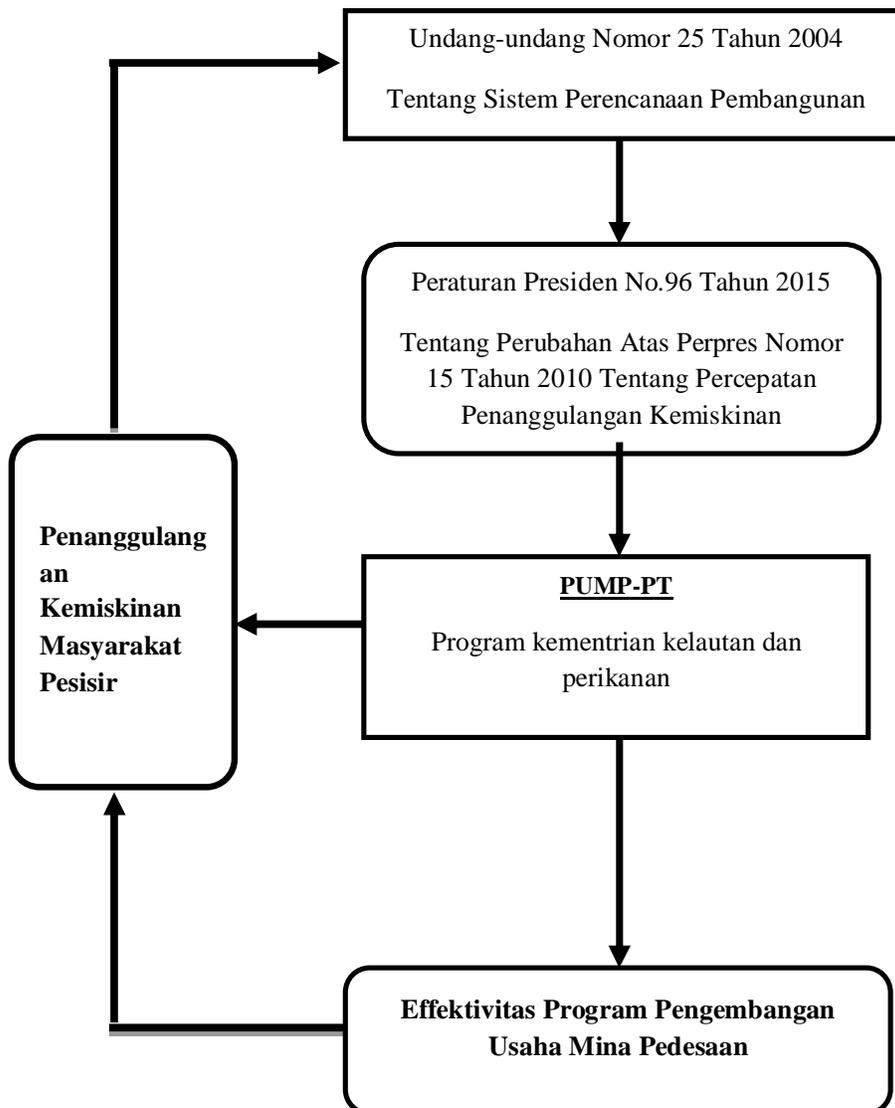
1. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat di capai, semakin efektif pula kegiatan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan sarannya, untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang telah dijualankan.

2. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisien, berkualitas dan percepatan yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
3. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu. Kemiskinan dapat diartikan juga sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.
4. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah sebagai suatu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat dan sebagai suatu upaya peningkatan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Nelayan adalah yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.

6. Masyarakat Nelayan adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan hidup di daerah pantai.

E. Kerangka Konsep

Menurut Kusmayadi dan Sugiarto, (2000: 49) Kerangka konsep merupakan hasil identifikasi yang sistematis dan analisis yang kritis dari peneliti berdasarkan kajian kepustakaan dan pengamatan awal. Sebagai dasar pijakan yang jelas dalam pengembangan teori, maka konsep yang dapat digambarkan akan di susun dalam model teoritis sebagai berikut :

Bagan 3.1**Kerangka konsep**

F. Teknik Penentuan Narasumber

Menurut Muhajir, (1993: 10) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemilihan subjek penelitian dapat menggunakan *criterion-based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. Selain itu dalam penentuan informan/narasumber, dapat digunakan model *snow ball sampling*. Metode ini digunakan untuk memperluas subjek penelitian.

Dalam penelitian ini data-data yang akan diperoleh dari informan atau narasumbernya adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan, Kriteria memilih informan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki posisi yang penting di instansi yang bersangkutan.
2. Mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Kasi Bidang Perikanan Tangkap.
2. Pendamping PUMP-PT.
3. Masyarakat Nelayan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain :

1. Ir. Rakhmawati selaku Kasi Perikanan Tangkap
2. Astuti, S.pi selaku Pendamping PUMP-PT Tahun 2011-2013.

3. Junhir selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Anak Nelayan Pancing Cumi
4. Ahmad Amsal selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Labuhan Deli
5. Muhammad Amin Ais Simin selaku Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Moleong, (2006 :121) adalah proses memasuki data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di ketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data.

Data yang akan dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menseleksi data seperti strategi pelaksanaan program PUMP, pencapaian tujuan program PUMP, dan laporan perkembangan KUB lalu disederhanakan dan diambil makna utamanya. Data yang disajikan didasarkan pada fakta-fakta yang saling berkaitan yang dapat diambil, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang pelaksanaan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Bagi Masyarakat Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, kemudian untuk menarik kesimpulan dari apa yang terjadi.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Suatu penelitian sudah jelas harus memiliki lokasi penelitian yang nyata dan jelas, yang berfungsi untuk menghindari kekeliruan dan manipulasi suatu data hasil penelitian tersebut. Adapun lokasi penelitian bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Penelitian ini dilaksanakan pada awal Februari sampai bulan Maret 2017.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, merupakan Pusat administrasi dan perdagangan, terletak pada $2^{\circ}27'$ - $2^{\circ}47'$ Lintang utara dan $98^{\circ}35'$ - $98^{\circ}44'$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Barat, Selatan, dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Secara Topografi miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5- 37.5 meter diatas permukaan laut dan panjang garis pantai 4 km. Suhu udara berkisar $23-32^{\circ}\text{C}$, dengan kelembaban udara rata- rata 82- 84%, dan curah hujan dengan rata- rata 203,5mm. Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan dengan 121 Kelurahan.

Wilayah pesisir Kota Medan yaitu Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan terletak di Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang memiliki panjang pantai hanya mencapai 4 km, meski panjang pantainya terkecil dibanding daerah lainnya, namun memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan bidang perikanan dan kelautan.

Kemiskinan penduduk di wilayah pesisir Kota Medan disebabkan kurangnya modal yang dimiliki para nelayan, rendahnya akses pasar dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Penyebab lain yang non ekonomis atau biasa disebut faktor sosial seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan, serta kurangnya perencanaan spasial yang mengakibatkan tumpang tindihnya beberapa sektor suatu kawasan, polusi dan kerusakan lingkungan. Sebagian nelayan pencari ikan dilaut, belum dapat meningkatkan taraf dan pendapatannya. Dimana penduduk nelayan yang daerahnya langsung berhadapan dengan laut, yang sumber penghidupan dari hasil laut, memiliki taraf hidup tergolong rendah.

1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan adalah sebagai berikut:

VISI

“ TERWUJUDNYA PERTANIAN PERKOTAAN YANG BERDAYA SAING, MEWUJUDKAN BERAGAM PANGAN SEHAT DAN PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK PANGAN YANG ASUH DAN KESEJAHTERAAN PETANI”.

Pertanian perkotaan yaitu sistem pertanian, peternakan dan perikanan yang di kembangkan di perkotaan yang memanfaatkan lahan yang terbatas namun mampu menghasilkan produk yang sehat dan berkualitas.

Berdaya saing yaitu memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi secara sehat, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki akses- akses produk yang luas, sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi perdagangan pada masa yang akan datang.

Pangan yang baik yaitu melakukan Pengawasan Peredaran produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan yang aman, sehat, utuh, dan Halal.

Produk bernilai tambah tinggi Menciptakan produk Pertanian yang mensejahterahkan pelaku/petani, mendorong dihasilkannya aneka produk segar, produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah.

Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Keluarganya mampu hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya.

MISI

Dalam rangka memujudkan visi ini maka misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Adalah:

1. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk

pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan komperatif daerah.

2. Mendorong Peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

TUJUAN

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, maka tujuan pembangunan Pertanian dan Perikanan periode 2016-2020 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan daya saing perekonomian kota.
2. Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan).

SASARAN

Sasaran merupakan indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2016-2020 adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro.
2. Meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan,
3. Meningkatnya produktivitas masyarakat pesisir dan petani.
4. Meningkatnya ketahanan pangan.

Indikator kinerja sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2020 yaitu:

Tabel 3.1.

**Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian dan
Perikanan Kota Medan**

Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	4,23	4,31	4,40	4,49	4,58
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB						
Produksi Perikanan	Ton/Ha	67,856	69,213	70,597	72,009	73,450
Konsumsi Ikan	Ton/Ha	24,32	26,75	29,43	32,37	35,61

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2016

STRATEGI

Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan adalah;

1. Memperkuat kedudukan, fungsi dan perananan Kota Medan sebagai pusat pemerintahan dan fungsi-fungsi regional nasional.
2. Mendorong peningkatan ekspor bersih/perdagangan kota
3. Meningkatkan daya saing produk lokal melalui standarisasi produk
4. Peningkatan kapasitas produktivitas pertanian
5. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian
6. Peningkatan produksi perikanan
7. Meningkatkan harkat dan taraf hidup petani, nelayan dan masyarakat pesisir

8. Meningkatkan ketahanan pangan

2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

a. Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan

Susunan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2.

Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan

NO	Jenis Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Golongan IV	19
2	Golongan III	61
3	Golongan II	15
4	Golongan I	3
JUMLAH		98

Sumber: DUK Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2016

b. Susunan Kepegawaian berdasarkan Bidang Organisasi

Susunan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan berdasarkan bidang Organisasi dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3.**Susunan Kepegawaian Bidang Organisasi**

NO	Bidang Organisasi	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Sub Bagian Keuangan	5
4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7
5	Sub Bagian Penyusunan Program	3
6	Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura	6
7	Bidang Produksi Peternakan	7
8	Bidang Produksi Perikanan	7
9	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet	8
10	Bidang Bina Usaha	6
11	Bidang Sumber Daya Kelautan	8
12	UPTD Klinik Kesehatan Hewan	3
13	UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan	6
14	UPTD Informasi Penyuluhan Peternakan	7
15	UPTD Budidaya Air Tawar	4
16	UPTD Pengembangan Bibit Holtikultura dan Peternakan	7
17	Kelompok Jabatan Fungsional	12
JUMLAH		98

Sumber: DUK Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2016

c. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Susunan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Perikanan kota Medan berdasarkan tingkat Pendidikan dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4.**Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Golongan	Posisi	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Strata 2	-IV	- Kepala Dinas - Sekretaris - Kepala Sub Bagian Keuangan -Kepala Sub Bagian Umum -Kabid PerikananTangkap -Kabid Peternakan -Kabid Produksi Tanaman Pangan -Kepala Bidang Kesehatan -Kepala Bidang Kelautan	8
2.	Strata 1	-IV -III	-Kasi Perikanan Tangkap -Kasi Perikanan Budidaya -Sekretaris Produksi Tanaman Pangan -Bendahara Perternakan -Bendahara Perikanan Tangkap -Kasi Peternakan	62
3.	D-III	-III -II	-UPTD Penyuluhan Peternakan -UPTD Budidaya Air Tawar -UPTD Perikanan Tangkap -Bagian Database	9

4.	SLTA/SPMA/SNAKMA	-II	-UPTD Informasi Penyuluhan Perikanan -Bagian Bina Usaha -Tim Penyuluh	16
5.	SMP	-I	-Staff	1
6.	SD	-I	-Staff	1
Jumlah				98

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2016

d. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Fungsi Jabatan

Susunan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Perikanan kota Medan berdasarkan fungsi jabatan dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Fungsi Jabatan

NO	Fungsi Jabatan	Jumlah Pegawai(orang)
1	Jabatan Fungsional	58
2	Jabatan Struktural	29
3	Staff	11
JUMLAH		98

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2016

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Medan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Walikota Medan. Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan yaitu:

1. Dinas

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Fungsi Sekretariat :

- a. Penyusunan rencana, Program, dan kegiatan sekretariatan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas.
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian keuangan dan kerumahtanggaan dinas.
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia , pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas Dinas.
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.

Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) sub bagian :

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program

3. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup peningkatan produksi, sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, pengawasan peredaran semprotan hama dan perlindungan tanaman.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup peningkatan produksi , sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan peredaran semprotan , dan perlindungan tanaman.
- c. Pemberian bimbingan lingkup pengelolaan pertanian
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Produksi Pangan dan Holtikultura yang membawahi 3 (Tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman pangan dan Hortikultura
- 3) Seksi Pengawasan Peredaran semprotan dan Perlindungan Tanaman

4. Bidang Produksi Peternakan

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas Dinas lingkup peningkatan produksi, sarana dan prasarana peternakan, serta pengawasan peredaran saponak.

Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana, Program, dan kegiatan Bidang Produksi Peternakan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup peningkatan produksi , sarana dan prasarana peternakan, serta pengawasan peredaran saponak.
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan lingkup produksi peternakan.
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis budidaya usaha intensifikasi peternakan dan diversifikasi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Produksi Peternakan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Peningkatan Produksi Peternakan
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan
- 3) Seksi Pengawasan Peredaran Saponak

5. Bidang Produksi Perikanan

Tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta hama dan penyakit ikan.

Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana, program dan kegiatan Bidang Produksi Perikanan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup produksi perikanan.
- d. Pembinaan pemberdayaan nelayan kecil.
- e. Penyiapan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan.
- f. Pemberian bimbingan lingkup pengelolaan produksi perikanan.
- g. Pelaksanaan bimbingan kepada penangkar ikan hias.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang produksi perikanan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Produksi Perikanan yang membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

- 1) Seksi Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
- 2) Seksi Perikanan Produksi Perikanan Budidaya
- 3) Seksi Hama dan Penyakit Ikan

6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, pengawasan peredaran hewan, dan medis veteriner.

Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana, program dan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, veteriner, pengawasan peredaran obat hewan, dan medis
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kesehatan hewan dan kesmavet.
- d. Pelaksanaan bimbingan kesehatan hewan dan kesmavet.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet yang membawahi 3(tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Kesehatan Hewan
- 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

3) Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan dan Medis Veteriner

7. Bidang Bina Usaha

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup promosi, pemasaran, pasca panen, teknologi pengelolaan hasil, dan pelayanan usaha.

Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana, Program, dan kegiatan Bidang Bina Usaha
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi, pemasaran, pasca panen, teknologi pengolahan hasil dan pelayanan usaha
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup bina usaha
- d. Pemberian bimbingan lingkup pengelolaan bina usaha
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Usaha yang membawahi 3(tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Promosi dan Pemasaran
- 2) Seksi Pasca Panen dan Teknologi Pengolahan Hasil
- 3) Seksi Pelayanan Usaha

8. Bidang Sumber Daya kelautan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengawasan, pengendalian, konservasi, rehabilitasi, dan pengembangan daerah pesisir.

Fungsi :

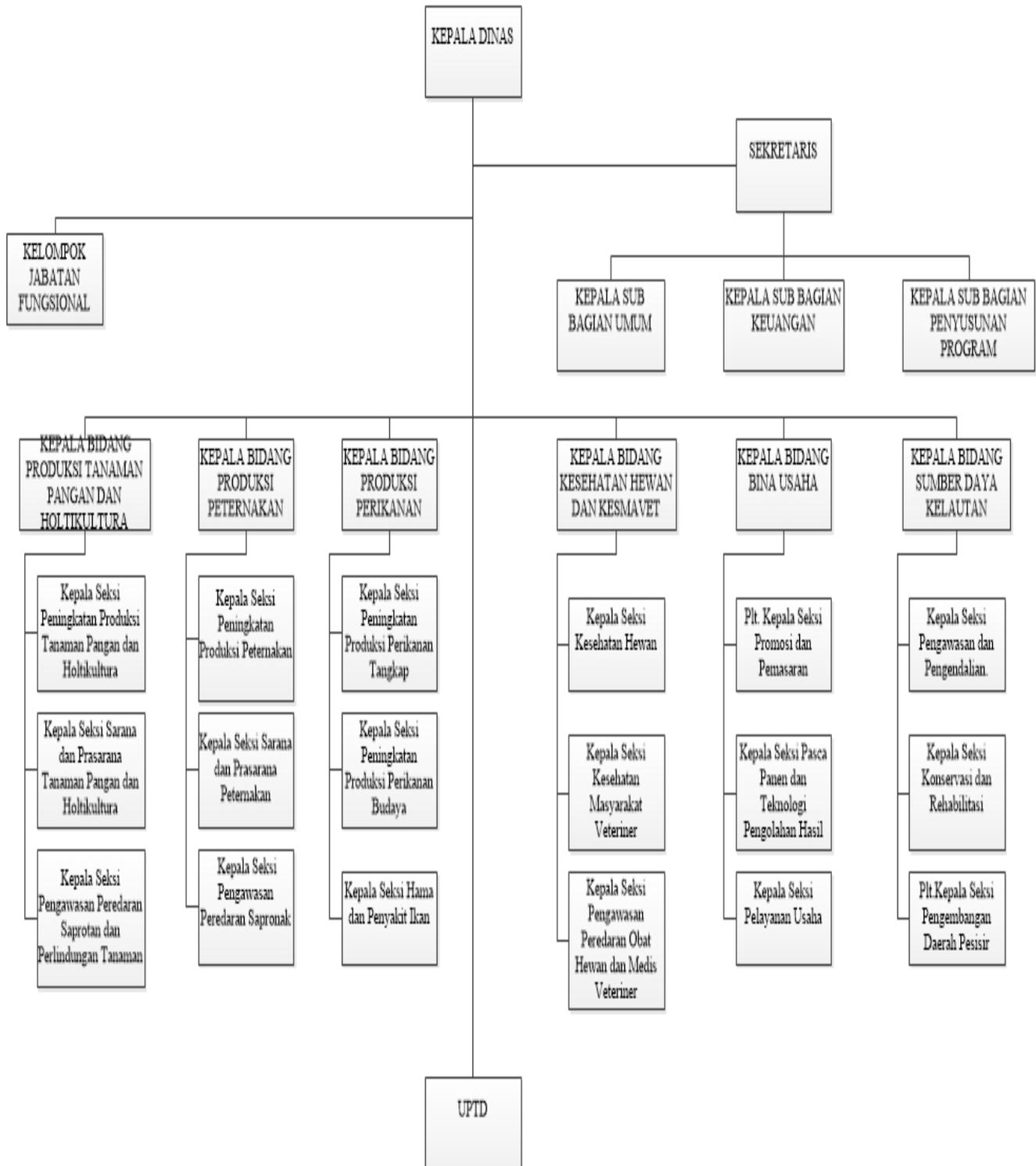
- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Sumber daya Kelautan
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup sumberdaya kelautan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup sumberdaya kelautan
- d. Pemberian bimbingan, pembinaan, dan pemantauan penggunaan sumberdaya kelautan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Sumber Daya Kelautan yang membawahi 3(tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi
- 3) Seksi Pengembangan daerah Pesisir

Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

dapat dilihat pada bagan 3.2 berikut :



4. Sarana dan Prasarana

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan di Jl. Keramat Indah No.4
 Selambo-Amplas Kecamatan Medan Denai. Email :
distanla@pemukomedan.go.id.

Keberhasilan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dan perikanan tidak bisa terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana pendukungnya. Prasarana pendukung utama sektor pertanian dan perikanan yang ada di kota Medan antara lain dapat dilihat dari tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6.

**Sarana dan Prasarana Sektor Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun
 2016**

NO	SARANA DAN PRASARANA	Jumlah(Unit)
1	PPI/TPI Milik Pemerintah	2
2	Cold Storage	9
3	Pabrik Pengalengan	3
4	Pabrik Es	3
5	Penggaraman	9
6	Tepung Ikan	4
7	Pabrik Makan Ikan	2
8	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (UPT)	1
9	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3

10	Departemen Kelautan dan Perikanan	1
11	Rumah Potong Hewan (Milik Pemko)	1
12	Rumah Potong Unggas	3
13	Praktek Dokter Hewan	10

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun 2016

Tabel 3.7.

**Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional Pertanian dan Perikanan Kota
Medan**

NO	Uraian	Jumlah (unit) 2016	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda 4	3	
2	Kendaraan Dinas Roda 2	20	
Jumlah		23	

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2016

Penyediaan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Sarana dan prasarana pertanian, perikanan, dan peternakan memiliki peran yang sangat penting dipandang dari sudut ekonomi secara makro, karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintahan kota Medan saja tetapi juga dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan perannya lainnya sebagai media dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini menjadi penting,

karena kegiatan sektor perikanan, pertanian dan peternakan memiliki keterkaitan yang erat terhadap perputaran ekonomi daerah dan masyarakat kota Medan.

5. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan, aturan, arahan, acuan, atau pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah digariskan melalui visi dan misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Kebijakan yang akan diambil sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan investasi, pengeluaran pemerintah daerah dan konsumsi masyarakat serta ekspor perdagangan.
- b. Mengembangkan Potensi dan kawasan ekonomi kota.
- c. Meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.
- d. Menciptakan inovasi teknologi tepat guna untuk optimalisasi lahan pertanian.
- e. Pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal, dan lahan perkarangan rumah.
- f. Peningkatan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan.
- g. Ektensifikasi dan intensifikasi produksi perikanan.
- h. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil, pembudidaya ikan tradisional dan petambak.
- i. Peningkatan kapasitas industri kecil, pengolahan hasil laut serta mengembangkan sentra produksi.

- j. Peningkatan ketersediaan pangan dalam mencegah kemiskinan dan kelaparan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kota Medan

Pada tahun 2014, menurut Badan Pusat Statistik Kota Medan sebanyak 3.629 keluarga di wilayah pesisir kota Medan masih digolongkan sebagai keluarga pra sejahtera dan sebanyak 17.384 keluarga merupakan keluarga sejahtera. Dari sisi penduduk, pada tahun 2014 masih terdapat 200,32 ribu atau 9,12 persen penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini mengalami penurunan jika di bandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 209,69ribu atau 9,64 persen dari total jumlah penduduk Kota Medan.

Tabel 4.1.

Jumlah Penduduk Miskin di Kota Medan Tahun 2012-2014.

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah/Jiwa	Presentase
(1)	(2)	(3)
2012	201,06	9,33
2013	209,69	9,64
2014	200,32	9,12

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Medan

Tabel 4.2.

Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kota Medan

No.	Kecamatan Pesisir	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Garis Kemiskinan (Jiwa)	Presentase Kemiskinan (%)
1.	Medan Labuhan	- Besar	-33,706	-5,266	-15,62
		- Tangkahan	-20,226	-2,435	-12,10
		- Martubung	-16,065	-2,699	-16,80
		- Sei Mati	-14,229	-3,733	-26,24
		- Pekan Labuha	-19,207	-7,246	-37,73
		- Nelayan Indah	-7,850	-3,533	-45,01
2.	Medan Marelan	- Tanah Enam	-28,517	-3,699	-12,97
		Ratus	-53,502	-8,755	-16,36
		- Rengas Pulau	-30,608	-6,707	-21,91
		- Terjun	-11,332	-4,362	-38,49
		- Paya Pasir	-17,384	-8,660	-52,63
		- Labuhan Deli			
3.	Medan Belawan	- Pulau Sicanang	-14,696	-7,230	-49,20
		- Belawan Bahagia	-11,888	-6,744	-56,73
		- Belawan Bahari	-11,988	-7,034	-58,68
		- Belawan I	-20,161	-10,813	-53,63
		- Belawan II	-20,161	-10,184	-48,70
		- Bagan Deli	-15,860	-8,635	-54,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Salah satu Kelurahan yang ada di wilayah pesisir Kota Medan yaitu Kelurahan Labuhan Deli yang ada di Kecamatan Medan Marelan yang merupakan kelompok masyarakat yang digolongkan sebagai masyarakat miskin dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan berjumlah 1,688. Di Kelurahan Labuhan Deli masyarakat nelayan memiliki karakteristik kegiatan perikanan yang meliputi perikanan tangkap, dimana penangkapan ikan dilakukan di daerah laut dan pesisir pantai.

Klasifikasi keluarga miskin yang ada di wilayah pesisir Kota Medan disebabkan dua unsur, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi mental seseorang, dan kemiskinan buatan. Kemiskinan mental atau biasa disebut kemiskinan subyektif yang diketahui kemiskinan yang diakibatkan oleh kondisi mental seseorang memang harus diterima, beda halnya dengan kemiskinan buatan dimana masyarakat/penduduk tersebut membuat dirinya miskin. Karena disebabkan oleh gaya hidup masyarakatnya selalu merasa kekurangan sehingga membuat dirinya menjadi miskin.

2. Potensi Sumber Daya Perikanan di Kota Medan

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan kota Medan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 kewenangan wilayah laut yang dimiliki pemerintah Kota Medan seluas 4 mil kearah laut dari garis pantai. Sebagai wilayah pesisir Kota Medan yang terletak diwilayah pantai timur Sumatera Utara, produksi penangkapan ikan mencapai 66.792 ton tahun 2014. Jumlah nelayan di Kecamatan Pesisir Kota Medan mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya yaitu 10.400 jiwa pada tahun 2013 menjadi 12.357 jiwa di tahun 2014. Pada tahun 2014 Kapal penangkapan ikan laut yang ada di Kota Medan Ukuran -10-30Gt berjumlah 2412 unit Kapal. Sementara itu, Kapal tanpa perahu berjumlah 1382 unit dan perahu tanpa motor berjumlah 111 unit. Alat penangkap ikan laut menurut jenisnya di tahun 2014 terdiri dari 2,347 pukat cincin,9,291 jaring, 6,908 pancing,dan 1,418 alat lainnya.

Salah satunya Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan yang mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan kota Medan, yaitu kapal penangkapan ikan laut yang ada di Kelurahan Labuhan Deli ukuran 5GT yang berjumlah 22 unit kapal beserta alat tangkapnya terdiri dari 121 jaring ikan senangin, 47 pukat cincin, dan 108 pancing cumi.

3. Kehidupan Nelayan di Kota Medan

Pola kehidupan nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Medan, dimana apabila nelayan kembali dari laut dan memperoleh hasil yang melimpah sehingga memperoleh uang yang relatif cukup besar, nelayan enggan bersedia untuk kembali melaut setelah masa istirahatnya berakhir.

Kemudian tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka ke agen. Karena Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di daerah Kecamatan Medan Belawan dan jarak tempuh kesana yang cukup jauh, maka dari itu para nelayan yang ada di Kelurahan Deli menjual hasil tangkapan laut kepada agen, dengan cara ketika sepulang mereka melaut nelayan akan menimbang hasil laut, kemudian datang ke agen yang terdekat lalu dijual dengan harga yang sangat jauh dibawah harga pasar. Sehingga nelayan banyak merugi, karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan harga yang dijual.

B. Analisis Berdasarkan Hasil Wawancara

1. Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidak mampuan atau keterbatasan fisik dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Sedangkan masyarakat nelayan adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan di laut dan hidup di daerah pantai, bukan mereka yang bertempat tinggal di pedalaman, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka juga mencari ikan di laut karena mereka bukan termasuk komunitas yang memiliki ikatan budaya masyarakat pantai.

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi sehingga untuk menyelesaikannya di perlukan sebuah solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Secara umum kemiskinan masyarakat pesisir di sebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak kepada masyarakat pesisir sebagai salah satu

pemangku kepentingan di wilayah pesisir. Seperti kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan disebabkan karena kurangnya modal, yang dimiliki para nelayan, rendahnya akses pasar serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga belum dapat meningkatnya taraf hidup pendapatan nelayan.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2017 dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Junhir, Bapak Ahmad Amsal dan Bapak Muhammad Amin Ais Simin selaku Nelayan di wilayah pesisir kota Medan mengatakan bahwa kehidupan masyarakat nelayan masih dibawah garis kemiskinan karena rendahnya tingkat kesejahteraan merupakan sebuah realitas umum yang terjadi di kalangan nelayan. Tak terkecuali perekonomian masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kota Medan yang tidak jauh berbeda dengan keadaan perekonomian masyarakat nelayan di daerah-daerah lainnya, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat masih jauh dari standar. ada beberapa faktor penyebab Kemiskinan Nelayan yaitu:

- a. Masih Beroperasi alat tangkap ilegal fishing sehingga merusak ekosistem laut.
- b. Ketidak tegasan dari pihak Pemerintah dalam menjalankan segala aturan baik kepres, peraturan pemerintah maupun UU.
- c. Mengakibatkan konflik antar Nelayan contohnya terjadi pembakaran alat tangkat ilegal fishing(trawls,pukat layang,dan lain-lain), disebabkan nelayan Tradisional merasa kecewa.

Karena alat tangkap tersebut sudah dilarang tapi mengapa masih dibiarkan beroperasi.

- d. Dalam setahun ada beberapa bulan masa panceklik. Maka dari itu Nelayan susah membawa pulang hasil melaut.

Kemiskinan yang melekat pada nelayan, khususnya nelayan tangkap dan buruh nelayan telah di respon oleh pemerintah dengan berbagai program. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang di tujukan kepada nelayan telah di terapkan, seperti program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT). Penanggulangan kemiskinan dalam program PUMP-PT dilakukan dengan pemberian modal usaha yang digunakan untuk pembelian infrastruktur alat tangkap yang diharapkan dapat menjadi aset produktif bagi nelayan dalam melaksanakan aktifitas ekonomi yang dapat meningkatkan produktifitas sekaligus nilai manfaat produktifitas sebagai konsekwensi akumulasi dari kepemilikan aset. Program PUMP-PT di Kota Medan dimulai pada bulan Desember pada Tahun 2011 sampai Tahun 2014, dimana penggunaan dananya yaitu untuk kebutuhan infrastruktur alat tangkap berdampak kepada peningkatan produktivitas nelayan.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2017 dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Junhir, Bapak Ahmad Amsal, dan Bapak Muhammad Amin Ais Simin selaku nelayan diwilayah pesisir kota Medan mengatakan bahwa tindakan Pemerintah untuk membantu kehidupan masyarakat nelayan sudah membantu dengan memberikan kontribusi baik

berupa uang tunai maupun kapal motor beserta alat tangkapnya. Saat ini Pemerintah juga memberikan bantuan seperti sudah adanya asuransi nelayan, tetapi realisasinya masih perlu dibenahi.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2017 dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Junhir, Bapak Ahmad Amsal, dan Bapak Muhammad Amin Ais Simin selaku nelayan di wilayah pesisir kota Medan mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk keluar dari masalah kemiskinan ekonomi yaitu dengan membentuk koperasi dan menabung sebagian hasil uang dari melaut guna untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan mengurangi angka kemiskinan nelayan.

Jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa program PUMP pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir Kota Medan belum berjalan secara maksimal. Karena nelayan di wilayah pesisir Kota Medan masih dibawah garis kemiskinan dikarenakan rendahnya perekonomian masyarakat nelayan, income pendapatan nelayan yang relatif rendah, dan tingkat kesejahteraan nelayan yang masih sangat jauh dari standar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Medan dapat dikatakan masih jauh dari standar kehidupan yang layak, dikarenakan masih banyak masyarakat nelayan yang miskin dikarenakan tidak mampu mengelola uang hasil melaut dan uang bantuan Pemerintah. Nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Medan apabila nelayan kembali dari laut dan memperoleh hasil laut nelayan terpaksa

menjual hasil tangkapannya ke agen dengan harga yang sangat jauh dibawah harga pasar dikarenakan tidak semua wilayah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sehingga nelayan merugi, karena hasil yang di dapat tidak sesuai dengan harga yang dijual.

2. Strategi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap. Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan, dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk melaksanakan semua kebijakan yang telah di rumuskan dan di tetapkan oleh pemerintahan pusat.

Pelaksanaan PUMP dilaksanakan oleh beberapa organisasi pelaksana yang terdiri dari Pokja PT, Tim Penyuluh Perikanan Tangkap, Tim Pembina, Tim Teknis, Tenaga Pendamping dan Pelabuhan Perikanan. Berikut adalah

Strategi pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan :

- 1) Melakukan Sosialisasi dan Melaksanakan identifikasi/seleksi kelompok usaha kelautan dan perikanan (KUKP).
- 2) Melaksanakan pemilihan KUKP sebagai calon penerima BLM
- 3) Melakukan identifikasi kelayakan kegiatan usaha KUKP calon penerima BLM
- 4) Memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha kelautan dan perikanan
- 5) Membantu dan mendampingi kelompok dalam penyusunan RUB dan dokumen administrasi lainnya
- 6) Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi dan pasar.
- 7) Membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi oleh KUKP
- 8) Fasilitasi pengembangan kelembagaan KUKP
- 9) Pendampingan manajemen, teknis, dan pemasaran
- 10) Membantu KUKP dalam membuat laporan perkembangan sesuai pedoman teknis
- 11) Menyusun laporan.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 16 Februari 2017 dengan beberapa narasumber yaitu Ibu Ir. Rakhmawati, dan, Ibu Astuti, S.Pi selaku Kasi Perikanan Tangkap dan Pendamping PUMP-PT Strategi pelaksanaan

program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) di Kota Medan beberapa narasumber mengatakan bahwa strategi pelaksanaan program PUMP-PT di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan diawali dengan sosialisasi yang mana penyuluh perikanan tangkap mengumpulkan calon peserta penerima PUMP-PT di BPPP Medan, kemudian memberikan arahan tentang bagaimana cara mengelola dana PUMP-PT. Seleksi yang dilakukan Oleh PPTK (Pendamping dan Verifikasi Tim Teknis) dilakukan dengan selektif dimana masa berdirinya KUB minimal 1 tahun, memiliki armada penangkapan nelayan penuh, harus memiliki tabungan KUB, mampu bekerja sama dalam KUB, rutinitas produksi KUB yang akan dilihat secara rutin oleh tim penyuluh/pendamping PUMP-PT. Kriteria penerima KUB harus memenuhi kriteria teknis yaitu KUB terdaftar pada database di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Direktorat PUPI lalu pengurus dan anggota KUB yang masuk dalam rencana usaha bersama (RUB) adalah nelayan kecil yang wajib memiliki kartu nelayan dan belum pernah mendapatkan BLM PUMP-PT dan tersedia data Produksi dan pendapatan anggota KUB. Adapun Kriteria penempatan KUB yaitu :

- 1) KUB calon penerima dana BLM baik pengurus dan anggota harus mempunyai kartu nelayan dan anggota KUB harus memiliki data produksi dan pendapatan serta mengisi formulir usulan

- 2) Identifikasi dan Seleksi KUB dilakukan oleh Teknis dibantu Tenaga Pendamping yang diusulkan kepada kepala Dinas untuk diverifikasi oleh Tim Teknis dan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan
- 3) Hasil Verifikasi Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Kepala Dinas Provinsi dan tembusan kepada Direktur PUPI
- 4) Usulan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota dilakukan validasi oleh tim Pembina, dan hasilnya diusulkan oleh kepala Dinas Provinsi kepada Direktur PUPI
- 5) Berdasarkan usulan dari kepala Dinas Provinsi yang telah ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Pokja PT memproses penetapan KUB calon penerima BLM PUMP-PT dengan keputusan Direktur Jenderal.

Kewajiban KUB penerima PUMP adalah membelanjakan seluruh alokasi Dana Hibah senilai Rp.100.000.000,- (Juta) untuk keperluan KUB sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang digunakan untuk infrastruktur penangkapan ikan sebagai aset bersama KUB, antara lain pembuatan bagan/rumpon, pembelian kapal beserta alat tangkap, seperti mesin, perahu, perbaikan dan kelengkapan dalam kegiatan penangkapan ikan dan biaya operasional, sewa, konsumsi. Pengelolaan produksi

dilakukan secara bersama guna meningkatkan ekonomi anggota KUB dan masyarakat pesisir sekitarnya.

Dan tidak luput banyak permasalahan dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program PUMP-PT, Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 16 Februari 2017 dengan beberapa narasumber yaitu Ibuk Ir. Rakhmawati, dan Ibuk Astuti S.Pi, selaku Kasi Perikanan Tangkap dan Pendamping PUMP-PT mengatakan bahwa PPTK berganti setiap tahun sehingga terkendala dalam Pembinaan dan Pelaporan. Masalah selanjutnya PUMP merupakan Program Aspirasi DPR sehingga KUB yang diusulkan masih baru dan Administrasi kelompoknya belum tertata dengan baik, dan Pencairan dana PUMP selalu diakhir tahun, sehingga laporan pemanfaatan oleh KUB tidak bisa tepat waktu.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa strategi pelaksanaan program PUMP yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sudah berjalan sesuai Juknis PUMP. Akan tetapi terkendala dalam pembinaan dan pelaporan, sehingga masih banyak masyarakat nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Medan kelompoknya belum tertata dengan baik sehingga laporan pemanfaatan oleh KUB tidak bisa tepat waktu.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Strategi pelaksanaan program PUMP yang diberikan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kota Medan yang mana tim penyuluh perikanan tangkap memberikan

arahan tentang bagaimana cara mengelola dana bantuan BLM PUMP-PT sudah dilakukan sangat baik. Akan tetapi sebagian KUB belum tertata dengan baik sehingga pencairan dana tidak bisa tepat waktu.

3. Pencapaian Tujuan

Sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan PUMP Bidang Perikanan Tangkap yang menjadi tujuan pelaksanaan program PUMP-PT adalah meningkatkan pendapatan nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan kecil di perdesaan/kelurahan, menumbuh kembangkan kewirausahaan di wilayah pesisir, meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Indikator Keluaran (output)
 - a. Tersalurkannya dana BLM PUMP-PT kepada KUB Perikanan tangkap sebagai modal usaha produktif penangkapan ikan
 - b. Termanfaatkannya BLM PUMP-PT untuk kegiatan usaha produktif
 - c. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan KUB melalui pendampingan dan pembinaan
2. Indikator Hasil (outcome)
 - a. Meningkatnya pendapatan nelayan anggota KUB
 - b. Berkembangnya kelembagaan KUB

3. Indikator Dampak (benefit dan Impact)
 - a. Berkembangnya usaha penangkapan ikan di lokasi PUMP-PT
 - b. Berkembangnya kewirausahaan nelayan
 - c. Berkembangnya KUB menjadi lembaga ekonomi

Kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan merupakan sebuah realitas umum yang terjadi di kalangan nelayan. Tak terkecuali perekonomian masyarakat nelayan di Kota Medan yang tidak jauh berbeda dengan keadaan perekonomian masyarakat nelayan di daerah-daerah lainnya, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat masih jauh dari standar. Kemiskinan yang melekat pada nelayan, khususnya nelayan tangkap dan buruh nelayan telah di respon oleh pemerintah dengan berbagai program. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang di tujukan kepada nelayan telah di terapkan, seperti program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT). Penanggulangan kemiskinan dalam program PUMP-PT dilakukan dengan pemberian modal usaha yang digunakan untuk pembelian infrastruktur alat tangkap yang diharapkan dapat menjadi aset produktif bagi nelayan dalam melaksanakan aktifitas ekonomi yang dapat meningkatkan produktifitas sekaligus nilai manfaat produktifitas sebagai konsekwensi akumulasi dari kepemilikan aset. Program PUMP-PT di Kota Medan dimulai pada bulan Desember pada Tahun 2011 sampai Tahun 2014, dimana penggunaan dananya yaitu untuk kebutuhan infrastruktur alat tangkap berdampak kepada peningkatan produktivitas nelayan.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 16 Februari 2017 dengan narasumber yaitu Ibuk Ir. Rakhmawati selaku Kasi Perikanan Tangkap mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan mengurangi kemiskinan masyarakat nelayan di kota Medan masih belum tercapai dengan baik karena masih kurangnya manajemen pengelolaan dana yang mana ketidak mampuan masyarakat nelayan kecil berkompetisi dalam persaingan dengan memiliki modal lebih besar dan masyarakat nelayan kecil di kota medan hanya mampu untuk bertahan dengan usaha perikanannya dengan pendapatan yang mencukupi saja.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 16 Februari 2017 dengan narasumber yaitu Ibuk Astuti, S.Pi. selaku Pendamping PUMP-PT mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan mengurangi kemiskinan masyarakat nelayan di kota Medan hanya 30% anggota KUB penerima PUMP yang mampu melakukan peningkatan ekonomi keluarga. Sedangkan 70% anggota KUB yang belum dapat mengurangi kemiskinan, karena sebagian anggota KUB tidak dapat mengelola dana dengan baik.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2017 dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Junhir dan Bapak Ahmad Amsal selaku Nelayan di wilayah pesisir kota Medan mengatakan bahwa program PUMP sudah dapat mengurangi kemiskinan bagi sebagian masyarakat nelayan jika mampu mengelola dan mengembangkan hasil bantuan dengan baik.

Perkembangan KUB yang ada di wilayah pesisir kota Medan dapat dilihat dari segi dimana satu KUB yang telah berhasil, maka di bentuk menjadi Koperasi. Pembentukan Koperasi ini bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan nelayan. dan beberapa KUB juga telah mengakses permodalan yang berkaitan dengan peminjam modal berdasarkan bagi hasil usaha dimana hasil yang didapat, sesama anggota KUB dibagi secara merata sesuai pendapatan setiap kegiatan melaut, akan tetapi kegiatan forum KUB belum terlaksana karena sebagian anggota KUB tidak berhasil mengelola dana BLM dengan baik.

Sesuai dengan hasil wawancara Pada tanggal 16 Februari 2017 dengan beberapa narasumber yaitu Ibuk Astuti, SPi, dan Ibuk Ir. Rakhmawati selaku pendamping PUMP-PT dan Kasi Perikanan Tangkap mengatakan bahwa, Sumber Daya Manusia masyarakat nelayan di Kota Medan sangat mempengaruhi proses keberlangsungan program PUMP-PT, yang mana rendahnya pendidikan masyarakat nelayan di kota Medan dan minimnya pengetahuan yang mengakibatkan banyak dari KUB tidak mampu mengelola BLM yang di berikan oleh pemerintah. Mentalitas dan cara befikir masyarakat nelayan di Kota Medan masih saja membawa kegagalan pada proses pelaksanaan dan efektivitas program PUMP-PT.

Berbagai macam kelemahan yang dimiliki masyarakat nelayan Kota Medan dalam proses pelaksanaan PUMP-PT ada strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dan KUB dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat nelayan.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 16 Februari 2017 dengan narasumber yaitu Ibuk Astuti S.Pi selaku pendamping PUMP-PT mengatakan bahwa, strategi yang dilakukan adalah dengan dilakukannya survei yang cermat terhadap calon penerima BLM dengan waktu yang cukup lama dalam persiapan penempatannya, proses pembinaan tidak lanjut kepada calon penerima KUB yang dilakukan dengan rutin sebagai follow up dari kegiatan, memfasilitasi KUB dalam rangka peningkatan akses permodalan KUB melalui perbankan. Evaluasi dan monitoring secara rutin untuk melihat perkembangan kelompok nelayan serta pengoptimalan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana BLM guna dapat mendapati hasil yang baik dan menunjang keberhasilan program PUMP-PT.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2017 dengan narasumber yaitu Bapak Ahmad Amsal selaku nelayan di wilayah pesisir Kota Medan mengatakan bahwa strategi KUB dalam mencapai upaya mensejahterakan masyarakat nelayan dengan cara mengadakan pertemuan dengan anggota KUB yang lainnya secara rutin, kerja sama antar anggota KUB dan para nelayan lain yang harus direalisasikan sesuai dengan RUB.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2017 dengan narasumber yaitu Bapak Junhir selaku nelayan di wilayah pesisir kota Medan mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan terhadap nelayan Kota Medan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan ber koordinasi kepada para nelayan tentang perkembangan

program PUMP secara rutin guna untuk mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat nelayan di Kota Medan.

Berdasarkan dari asumsi yang dikemukakan diatas bahwa pencapaian tujuan dalam suatu pelaksanaan suatu program dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa pencapaian tujuan program PUMP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kota Medan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik yang mana ketidak mampuan masyarakat nelayan kecil berkompetisi dalam persaingan dengan memiliki modal yang lebih besar. Masyarakat nelayan hanya mampu bertahan dengan usaha perikanan dengan pendapatan yang mencukupi saja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan program PUMP di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dapat dikatakan tidak efektif, dikarenakan peningkatakan kesejahteraan masyarakat nelayan dan mengurangi kemiskinan hanya 30% masyarakat nelayan yang mampu keluar dari masalah kemiskinan. Sebagian masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kota Medan tidak mampu mengelola dana BLM PUMP dan tidak mampu menumbuh kembangkan usaha perikananannya.

4. Mengevaluasi Hasil

Mengevaluasi adalah sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT), guna untuk melihat sejauh mana tujuan program PUMP-PT di Kota Medan tercapai.

Sesuai dengan hasil wawancara Pada tanggal 15 Februari 2017 dengan beberapa narasumber yaitu Ibu Ir. Rakhmawati, Ibu Astuti S,Pi, Bapak Ahmad Amsal, Bapak Junhir selaku kasi perikanan tangkap, pendamping PUMP dan masyarakat nelayan mengatakan bahwa, pelaksanaan program PUMP-PT telah terlaksana sudah cukup baik dan dari 95 kelompok KUB yang sudah mendapatkan bantuan BLM dan diantaranya sudah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan serta terbentuknya kemandirian dalam berwirausaha dalam penggunaan BLM. Kalau pada Dinas hambatan itu hanya pada KUB yang menyalagunakan alokasi dana bantuan PUMP dan rendahnya kemauan nelayan melengkapi administrasi persyaratan calon penerima PUMP. Sedangkan dari nelayan sendiri kendalanya adalah ketidakmampuan beberapa kelompok yang bertahan dengan usahanya di karenakan berbagai hambatan-hambatan yang di hadapi anggota kelompok nelayan, hambatan-hambatan yang paling sering di hadapi KUB adalah cara berfikir serta perbedaan pendapat dari para anggota maupun dari pihak luar , kurang mampuan masyarakat dalam mengelola BLM juga sangat mempengaruhi hasil pelaksanaan program PUMP yang mana tidak mempunyai anggota nelayan dalam manajemen keuangan kelompok tersebut mengakibatkan terhambatnya aktivitas pelaksanaan program PUMP-PT di Kota Medan.

Ketimpangan struktur kepemilikan modal dan alat tangkap merupakan faktor dominan yang menyebabkan nelayan membangun relasi dengan pemilik sebagai pemilik modal, ditambah biaya operasional melaut yang

semakin tinggi, resiko ketidakmenentuan hasil tangkapan, pemenuhan kebutuhan harian dan berbagai tekanan lainnya mendorong nelayan membangun relasi dengan para pemberi/pemilik modal (individu/lembaga) sebagai katup penyelamat sekaligus meminimalisir resiko ketidakmenentuan aktivitas ekonomi. Meskipun nelayan pemilik sebagai pranata ekonomi lokal memberikan berbagai bantuan terhadap nelayan, namun tidak dapat dikesampingkan bahwa relasi ekonomi dan sosial yang dijalankan tersebut di bangun di dalam strukrur ekonomi dan sosial yang identik dengan ketimpangan kepemilikan sumber daya modal dan akses terhadap pasar, sehingga akan berdampak pada kemungkinan potensi keuntungan yang hanya dapat dinikmati oleh pemilik modal. Tentu saja kondisi tersebut akan mengakibatkan nelayan mencari-cari sumber lain untuk mencukupi kebutuhannya, yang berdampak timbulnya ketergantungan nelayan terhadap para pemberi/pemilik modal. Dalam kondisi ini, sangat sulit bagi nelayan meningkatkan kesejahteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan program PUMP-PT di kota medan sebagian belum dapat mengurangi ketergantungan nelayan terhadap para pemilik/pemberi modal seperti yang diuraikan di atas dikarenakan BLM yang di berikan kepada masyarakat nelayan belum mampu menutupi modal usaha nelayan tersebut.

Keberadaan program PUMP-PT di Kota Medan yang kurang efektif dikhawatirkan akan memberi dampak yang tidak baik, jika tidak ada penanganan yang serius terutama terhadap kelembagaan KUB yang tidak

efektif. Kurangnya bimbingan dari pemerintahan pasca penyaluran dana, mengakibatkan para pengelola KUB tidak dapat mengelola dana secara optimal. Banyak nelayan yang memandang dana ini merupakan bantuan yang tidak perlu di kembalikan. Padahal maksud program ini yaitu KUB harus mampu mengelola dana sebaik-baiknya.

Akibat dari kondisi tersebut, nelayan tidak lagi mempunyai sumber modal usaha, dikarenakan tidak adanya perputaran modal. Realitas pemanfaatan BLM menunjukkan kecenderungan kegagalan pemanfaatan BLM secara kelembagaan. Mayoritas KUB gagal menghidupkan aktivitas organisasi KUB, padahal program PUMP-PT menghendaki nelayan mampu berorganisasi secara mandiri guna memecahkan berbagai masalah dan mengembangkan potensi bersama. Alih-alih menghidupkan KUB sebagai suatu pranata ekonomi nelayan, kegiatan KUB justru nyaris tidak berjalan paska bantuan diberikan.

Sesuai dengan hasil wawancara Pada tanggal 15 Februari 2017 dengan beberapa narasumber yaitu Ibuk Ir. Rakhmawati, Ibuk Astuti S.Pi, Bapak Junhir, cara mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan mengatakan bahwa, cara yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada seperti melakukan pembinaan yang mana mengarahkan kelompok nelayan dalam hal ketika anggota kelompok nelayan pergi melaut dan setiap putarannya nelayan diarahkan untuk menyeter uang sebesar Rp.25.000, guna sebagai uang iuran per anggota yang mana uang tersebut bisa digunakan oleh setiap anggota

kelompok yang memerlukan bantuan modal usaha, dan dilaksanakannya berbagai pelatihan-pelatihan yang berupa pelatihan perawatan mesin dan perakitan jaring, serta yang paling diperkuat oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan adalah melalui sosialisasi, rapat-rapat rutin, penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan rutin.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, Mengevaluasi hasil program PUMP yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, dikarenakan implementasi PUMP terlihat dengan sudah tersalurnya dana dengan baik, dan telah dipergunakan oleh KUB penerima. Akan tetapi pengawasan KUB belum terjadwal dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Mengevaluasi hasil program PUMP bidang perikanan tangkap dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat nelayan di Kota Medan dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Karena program PUMP di Kota Medan telah dihentikan oleh Pemerintah pusat pada tahun 2014 dikarenakan KUB tidak mampu bertahan dalam usaha perikanannya, dan berbagai macam hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program PUMP adalah kondisi alam dan ketidakpedulian masyarakat pesisir Kota Medan terhadap penanggulangan kemiskinan nelayan.

C. Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Bagi Masyarakat Nelayan

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang di jalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tepat sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) merupakan pendekatan pengembangan usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010). Sesuai dengan misi kementerian kelautan dan perikanan Tahun 2010-2014, yaitu “Mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan”.

Kota Medan merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran dari program PUMP-PT, karena masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan berjumlah 12.357 jiwa dari masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir kota Medan diantaranya Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan .Sebagian masyarakat nelayan belum memenuhi standar kesejahteraan. Pendapatan yang diperoleh dari usaha melaut tidak atau belum mencukupi pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Hal ini ditunjukkan sebagian nelayan yang belum memiliki

tempat tinggal yang tetap, tingkat pendidikannya belum mencapai standar dan kurangnya sarana prasarana yang menunjang untuk pekerjaan.

Pelaksanaan program PUMP-PT di Kota Medan, diharapkan akan memberi perubahan dalam mengurangi angka kemiskinan masyarakat nelayan di wilayah pesisir yang ada di Kota Medan seperti Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan melalui tujuan program PUMP-PT yaitu meningkatkan pendapatan nelayan, menumbuhkan kewirausahaan nelayan, dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan.

Program BLM-PUMP menyedot anggaran 87% anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri KP tahun 2012 yang besarnya hingga 783,85 milyar sebagaimana data yang dilansir Sekretariat Jendral KKP. Pemerintah memberikan bantuan melalui BLM-PUMP dalam bentuk fisik dan non fisik. Bantuan dalam bentuk fisik yaitu BLM PUMP-PT berupa uang sebesar Rp.100.000.000 telah di berikan kepada setiap Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang disesuaikan dengan rekening masing-masing KUB pada bulan November Tahun 2011 sampai Tahun 2013. Berikut tabel data penerima BLM PUMP-PT Tahun 2011-2013 di Wilayah Pesisir Kota Medan.

Tabel 4.3.

Data Pemanfaatan BLM PUMP Perikanan Tangkap Tahun 2011-2014.

Rincian	Alokasi KUB	Nilai Rencana Usaha (Rp.000,-)							
		Sarana Penangkapan				BO	PN	Asuransi	Total
		Perahu	Mesin	BAP	ABP				
Tahun 2011	10 KUB	691.50 0.	125.500	117.000	21.000	-	-	-	1.000. 000
Tahun 2012	19 KUB	1.178,2 54	325.512,8	256.078,5	78.828	50.066,7	11.260,	-	1.900. 000
Tahun 2013	15 KUB	709.75 0	271.103	350.359	100.852	37.927	1.500	28.500	1.500. 000
Tahun 2014	2 KUB	45,300	42.615	69.535,5	12.725	29.824,5	-	-	200.00 0
Total	44 KUB	2.624,8 04	764930,8	792.973	213.405	117.818,2	12.760	28.500	4.600. 000

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2013

Tabel 4.4.

**Data Penerima BLM PUMP-Perikanan Tangkap di Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan Marelan Kota Medan**

NO.	Nama KUB	Nama Ketua	Kelurahan	Kecamatan
1.	Nelayan Sehati	M. Yusuf	Labuhan Deli	Medan Marelan
2.	Nelayan Mitra bahari	H. Awalludin	Labuhan Deli	Medan Marelan
3.	Anak Nelayan Pancing Cumi	Junhir	Labuhan Deli	Medan Marelan
4.	Kelompok Tani Nelayan Deli	Syahrizal	Labuhan Deli	Medan Marelan
5.	Nelayan Anak Deli	Ahmad Amsal	Labuhan Deli	Medan Marelan
6.	Nelayan Putra Melayu Deli	Ibnu Hajar	Labuhan Deli	Medan Marelan
7.	Anak Nelayan Pancing Cumi	Junhir	Labuhan Deli	Medan Marelan
8.	Nelayan Bahari	Muhajirin	Labuhan Deli	Medan Marelan
9.	Karya Putra Deli	Nazaruddin	Labuhan Deli	Medan Marelan
10.	Wijaya	Abdul Latif Simon	Labuhan Deli	Medan Marelan

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Bantuan non fisik dari program PUMP-PT antara lain berupa :

- 1) Sosialisasi program yang di berikan oleh tim teknis terdiri atas kepala Dinas, kepala seksi bidang perikanan tangkap dan pendamping kegiatan sosialisasi kepada KUB dengan waktu yang berbeda yang dihadiri anggota KUB berkelompok.

- 2) Pengelola KUB telah sesuai dengan syarat ketentuan, yaitu minimal pendidikan lulusan SMA.
- 3) SDM penyuluh pendampingan di sediakan sesuai dengan syarat ketentuan minimal pendidikan lulus SMA dan telah mengikuti pelatihan pendampingan.
- 4) Kelengkapan administrasi KUB tidak di pergunakan secara optimal, manajemen pengurus KUB ketua kelompok, bendahara dan sekretaris tidak berjalan sesuai fungsinya.
- 5) Pelatihan diadakan oleh pemerintah untuk menambah kualitas SDM pengelola KUB dan penyuluh pendamping, namun tidak semua KUB mengikuti pelatihan.
- 6) Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB). Kegiatan pengelolaan dana tidak mengikuti RUB dan sebagian kecil mengikuti RUB.

Penentuan efektivitas program PUMP-PT di tentukan berdasarkan tercapainya ketiga tujuan program PUMP-PT yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan kecil di pedesaan/kelurahan
2. Menumbuh kembangkan kewirausahaan nelayan di pedesaan/kelurahan
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan.

Hasil penelitian mendapati bahwa program PUMP-PT kurang efektif, hal ini dikarenakan tujuan program PUMP-PT yang tidak dapat tercapai dengan baik. Yang mana pendapatan nelayan masih saja belum bisa meningkat dengan baik pada Tahun 2012. Tujuan kedua yaitu menumbuh kembangkan kewirausahaan nelayan dapat di simpulkan kurang baik karena ada beberapa dari kelompok setelah mendapatkan bantuan BLM mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik dan malah menjual alat-alat tangkap ikan dan yang mana uang hasil penjualan alat tangkap mereka pergunakan untuk keperluan pribadi mereka yang bersifat komersil. Tujuan program yang ketiga yakni meningkatkan fungsi kelembagaan KUB sebagai mitra lembaga keuangan, tidak tercapai.

Berikut hasil penilaian dari ketiga indikator keefektifan program PUMP-PT, yaitu :

1. Pendapatan

Usaha perikanan tangkap di wilayah pesisir Kota Medan merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat nelayan, di samping sumber pendapatan lain seperti buruh petani, buruh, ataupun pedagang. Usaha perikanan tangkap ini di dominasi nelayan tradisional, yang memiliki karakteristik seperti penggunaan teknologi sederhana, siklus pekerjaan berdasarkan musim, produksi hasil tangkapan atas kebutuhan personal. Kelompok nelayan tradisional inilah yang menjadi sasaran BLM PUMP-PT dana yang diperoleh digunakan sepenuhnya untuk keperluan pembelian mesin, perbaikan perahu, pembelian jaring tangkap dan keperluan penangkapan ikan,

sehingga mengakibatkan produktivitas nelayan menjadi lebih besar, sebab nelayan sudah memiliki sarana yang dibutuhkan agar lebih mampu memperluas jangkauan area tangkapan.

Peningkatan produktivitas berakibatkan pendapatan nelayan juga turut meningkat. Dan hambatan yang sangat mempengaruhi hasil pendapatan nelayan berada pada faktor alam yaitu kondisi cuaca yang tidak mendukung di laut atau musim badai, lalu musim panceklik atau musim ikan yang mana mengakibatkan para nelayan kurang membawa hasil yang baik ke daratan sehingga nelayan merugi. Mahalnya harga-harga alat tangkap ikan seperti mesin, jaring, bahan bakar minyak dll, yang membuat para nelayan sering kekurangan modal dan harus meminjam kepada pemilik modal/rentenir dengan bunga yang cukup besar dan ketika pulang melaut nelayan harus menyisihkan uang untuk membayar persenan bunga hutang tersebut. Bisa di simpulkan bahwa program PUMP-PT belum efektif dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

2. Kewirausahaan

Jiwa kewirausahaan akan sangat menentukan keberhasilan dalam kegiatan usaha baik dari sejak perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap usaha yang dilakukannya. Seorang nelayan harus memiliki profil kewirausahaan seperti membuka kedai pesisir, menjadi anggota koperasi, dengan persyaratan yang diberi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan, sebagai pemberi dana. Para nelayan yang

menjadi anggota KUB tidak hanya dituntut mampu mengelola, tetapi juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang lebih penting sikap mental wirausaha, manajemen dan keterampilan. Meski, salah satu Program PUMP dari Dinas Pertanian dan Perikanan adalah menciptakan jiwa kewirausahaan para Nelayan melalui membuka kedai pesisir, akan tetapi sejauh ini rencana membuka kedai pesisir guna mensejahterahkan nelayan belum terealisasi. Indikator kewirausahaan dalam hal ini bisa dikatakan kurang efektif karena banyaknya kegagalan kelompok nelayan dalam mengelola KUB.

3. Kelembagaan KUB

Keberadaan KUB di bentuk setelah di sosialisasikan program PUMP-PT yang mensyaratkan sasaran penyaluran dana BLM yaitu nelayan-nelayan yang tergabung di KUB. Pembentukan KUB diharapkan mampu menyalurkan dan mengolah dana sebagai modal usaha nelayan, dengan demikian KUB merupakan mitra lembaga keuangan. Hal ini dapat dilihat juga dari SDM nelayan yang mana dengan ketidakmampuan mengelola bantuan BLM dan kurangnya perputaran uang yang terjadi di KUB dan ketidakberlanjutan anggota KUB untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di karenakan kehabisan modal dan selalu merugi, indikator kelembagaan dalam hal ini bisa dikatakan tidak efektif karena banyaknya kegagalan masyarakat nelayan dalam mengelola kelembagaan KUB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil dan penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan bagi Masyarakat Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan sebuah solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Kemiskinan nelayan di wilayah pesisir Kota Medan masih dibawa garis kemiskinan karena, disebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan masih jauh dari standar. Penanggulangan kemiskinan dalam program PUMP-PT dikatakan sudah efektif dengan dilakukannya pemberian modal usaha kepada KUB yang digunakan untuk pembelian infrastruktur alat tangkap namun disalahgunakan para nelayan untuk kebutuhan pribadi.
2. Strategi Pelaksaaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan dalam penanggulangan kemiskinan bagi Masyarakat Nelayan di Kota Medan dapat dikatakan tidak efektif, hal tersebut dilihat dari kurangnya manajemen dalam pengelolaan dana yang tidak mengikuti

RUB, tidak berputarnya modal di KUB dengan baik, tenaga pembimbing tidak berfungsi dengan baik, kurangnya pengawasan pada saat setelah di salurkan nya BLM kepada anggota KUB. Setelah BLM tersalurkan dan menghasilkan infrastruktur penangkapan ikan yang masih digunakan sebagai aset bersama/KUB dan KUB di harapkan berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat nelayan dan ini tidak berjalan dengan baik.

3. Pencapaian Tujuan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) Dalam Penanggulangan bagi Masyarakat Nelayan di Kota Medan dapat dikatakan masih belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dari penyaluran dana BLM hanya mampu meningkatkan pendapatan dalam waktu jangka pendek saja dan tidak mampu menumbuh kembangkan kewirausahaan nelayan serta tidak mampu meningkatkan fungsi kelembagaan KUB sebagai mitra lembaga keuangan bagi nelayan.
4. Mengevaluasi hasil Program Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan bagi Masyarakat Nelayan di Kota Medan dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena semenjak Tahun 2014 program PUMP-PT di Kota Medan telah di hentikan oleh Pemerintahan Pusat dikarenakan ketidakmampuan KUB bertahan dalam usaha perikanannya yang mana sebagai macam hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program PUMP-PT. Faktor penghambat

dalam pelaksanaan program PUMP adalah kondisi alam dan ketidakpedulian masyarakat pesisir Kota Medan yang masih rendah.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian, dimana saran sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang.

1. Sosialisasi terhadap masyarakat perlu diperdalam sehingga pemahaman masyarakat terhadap setiap program yang dibuat dapat dipahami secara baik, mengingat tingkat pendidikan masyarakat nelayan yang rendah.
2. Di harapkan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan hendaknya lebih mengoptimalkan pemberian BLM kepada masyarakat nelayan yang mana BLM saat ini dalam bentuk uang tunai dan agar kedepannya BLM tersebut di berikan dalam bentuk langsung alat-alat tangkap ikan seperti kapal, mesin tempel, jaring tangkap dan lain- lain sehingga meringankan para nelayan dalam permodalan usahanya.
3. Intensitas kegiatan pembimbingan dari pemerintah perlu di tingkatkan dan menyediakan SDM tim pembimbing yang berkompeten.
4. Perlu ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang menunjang kualitas SDM masyarakat nelayan, seperti pelatihan atau khursus dengan lebih rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta : PT. Balai Pustaka.
- Ensiklopedia Indonesia 2001. Ihtiar baru-Van haeve dan Elsevier publishing projects Jakarta.
- Friedman. 2010. *Keperawatan Kemiskinan Keluarga* . Jakarta : EGC- Riset, Teori dan Praktek
- Gibson, Ivencevich, and Donnelly,1992. *Organisasi Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Singapura : Pustaka Nasional ptc. Ltd.
- , 2001. *Administrasi Perkantoran*, Edisi Revisi, Bandung : Mandar Maju.
- Hall, Anthony dan Midgley. 2004. *Social Policy for Development*, London : Sage Publications Ltd
- Hassan, Sadly. 1997. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Horton, Paul dan Hunt. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat.1996. *Pengantar Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Komaruddin, Sastradipoera. 2000. *Ensiklopedia Indonesia*, Bandung : Alumni
- Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta Pembaharuan.
- Kusnadi, 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LkiS.
- , 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Moleong, Lexy. 2007 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- M.Khalil Mansyur.1984. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya : Usaha Nasional Indonesia.

- Mankiw. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian.SondangP. 2001. *Audit Manajemen*. Jakarta : Bumi aksara.
- 2001. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimesi dan Strategi* Jakarta: Bumi Aksara.
- 2007. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta .
- Siswanto, Bedjo. 2005. *Pengantar Management*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sukirno. 1995. *Makro Ekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafika Persada
- Sumaryadi. I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Suyanto, Bagong. 2001. *Perangkap Kemiskinan*. Surabaya : Airlangga University Press
- , 2003. *Problem dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*. Surabaya: Airlangga University Press
- Steers. Richard M. 2005. *Efektivitas Organisasi(terjemahan)*. Jakarta : Erlangga.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Widodo. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10. Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Sumber Lain

www. Seputarpengetahuan.com /14 pengertian masyarakat menurut parah ahli.

Repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8825/skripsi/pdf/sequence;1

Petunjuk Teknis Perikanan Tangkap 2014

<https://www.google.co.id/url?>

<http://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/kemiskinan-pengertian-dimensi-indikator-dan-karakteristiknya>

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/mkdu_isd/bab8-ilmu_pengetahuan_teknologi_dan_kemiskinan.pdf